

Palestina dalam Pusaran Sejarah dan Solidaritas Umat Islam

Palestine in the Vortex of History and Muslim Solidarity

Azwar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: azwar@stiba.ac.id

Abd. Rahim Yunus

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: rahimyunus397@gmail.com

Susmihara

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: susmiharad@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 10 June 2025
Revised : 29 June 2025
Accepted : 30 June 2025
Published : 4 July 2025

Keywords: Palestine, Islamic world, modern history, colonialism, peace

Kata kunci: Palestina, dunia Islam, sejarah modern, kolonialisme, perdamaian

Abstract

The Israel-Palestine conflict is one of the most complex and prolonged issues in modern history, particularly within the context of the Islamic world. This study aims to examine the historical roots of the establishment of the state of Israel and the loss of Palestinian sovereignty, explain the main dynamics of the conflict from the 20th century to the present, analyze the response of the Islamic world, and evaluate the various efforts made toward conflict resolution. Using a descriptive-qualitative method and a historical approach, this research relies on literature review from academic works, official documents, and other credible sources. The findings show that the conflict is rooted in colonialism, the Zionist project, and Western policies following the fall of the Ottoman Caliphate. The declaration of the establishment of Israel in 1948 marked the beginning of open conflict and a humanitarian tragedy for the Palestinian people. The Islamic world generally demonstrates moral and religious solidarity with Palestine, though concrete actions among Islamic countries often lack unity. Peace efforts made over the past decades have frequently faced obstacles due to political interests and power imbalances. Therefore, a comprehensive understanding of this conflict requires a historical, political, and humanistic approach in order to promote a just and sustainable resolution for all parties involved.

Abstrak

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu isu paling kompleks dan berlarut dalam sejarah modern, terutama dalam konteks dunia Islam. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji akar sejarah terbentuknya negara Israel dan hilangnya kedaulatan Palestina, menjelaskan dinamika konflik dari abad ke-20 hingga kini, menganalisis respons dunia Islam, serta mengevaluasi berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan historis, penelitian ini mengandalkan studi pustaka terhadap berbagai literatur akademik, dokumen resmi, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar pada kolonialisme, proyek Zionisme, dan kebijakan Barat pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Deklarasi pendirian Israel pada 1948 menjadi titik awal konflik terbuka dan tragedi kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dunia Islam secara umum menunjukkan solidaritas moral dan religius terhadap Palestina, namun langkah konkret antarnegara sering kali tidak seragam. Upaya perdamaian yang telah diupayakan selama beberapa dekade kerap mengalami hambatan akibat kepentingan politik dan ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konflik ini membutuhkan pendekatan yang historis, politis, dan humanistik agar dapat mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

How to cite: Azwar, Abd. Rahim Yunus, Susmihara. "Palestina dalam Pusaran Sejarah dan Solidaritas Umat Islam", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 295-312. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2025, Azwar, Abd. Rahim Yunus, Susmihara



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu isu paling pelik, kompleks, dan berkepanjangan dalam sejarah dunia modern. Konflik ini bukan hanya sekadar pertentangan antara dua entitas politik, tetapi telah menjelma menjadi simbol pertarungan ideologi, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan: politik, agama, budaya, bahkan kemanusiaan global¹. Dalam kurun waktu lebih dari satu abad, konflik ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, dan penderitaan yang tak terhitung, menjadikannya sebagai salah satu tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung hingga hari ini.

Secara geografis, wilayah Palestina memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di kawasan Timur Tengah yang menjadi persimpangan tiga benua. Selain itu, Palestina juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting karena menjadi tanah suci bagi tiga agama besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi². Bagi umat Islam, Palestina—khususnya kota al-Quds (Yerusalem)—merupakan tempat suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Di dalamnya terdapat Masjid al-Aqsha yang memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat tinggi. Maka tak heran bila konflik

¹ Hersa Syulizar Andien et al., "Peran Muslim Dalam Konflik Geopolitik: Analisis Perang Israel-Palestina," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024): 152-68.

² Nelvi Susanti and Lusi Soraya, "History of Islamic Civilization in the West Asian Region: Tracking the Roots of the Palestine-Israel Conflict," *Journal of Islamic History* 4, no. 1 (2024): 43-61.

yang terjadi di wilayah ini menarik simpati dan perhatian luar biasa dari umat Islam di seluruh dunia.

Dalam konteks sejarah dunia Islam modern, isu Palestina tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme yang membekas hingga hari ini. Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I menjadi titik awal kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan Barat, terutama Inggris dan Prancis, melalui perjanjian-perjanjian rahasia seperti *Sykes-Picot Agreement* dan *Deklarasi Balfour*³. Perjanjian ini menjadi awal dari imigrasi besar-besaran orang-orang Yahudi Eropa ke tanah Palestina, yang memicu ketegangan dengan penduduk asli Palestina yang mayoritas Arab dan Muslim⁴. Keterlibatan PBB dalam membagi wilayah Palestina pada tahun 1947, dan pendirian negara Israel pada tahun 1948 yang diiringi dengan tragedi *Nakbah* (malapetaka) bagi bangsa Palestina, menjadi titik balik sejarah yang menyakitkan dan terus membayangi hubungan kedua bangsa hingga kini⁵.

Konflik Israel dan Palestina bukan hanya soal perebutan tanah atau batas wilayah semata, tetapi mencakup persoalan yang lebih mendalam seperti hak untuk hidup merdeka, hak untuk kembali ke tanah air, serta pengakuan terhadap identitas bangsa Palestina. Di sisi lain, negara Israel dengan dukungan kuat dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, terus memperkuat posisi politik, ekonomi, dan militernya, termasuk melalui pembangunan permukiman ilegal dan blokade atas wilayah Gaza⁶. Resonansi konflik ini terasa kuat di dunia Islam. Palestina, yang sering kali disebut sebagai “jantung dunia Islam”, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan. Banyak negara dan masyarakat Muslim merasa memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membela rakyat Palestina. Tak jarang pula, konflik ini memengaruhi kebijakan luar negeri sejumlah negara Islam, bahkan menjadi faktor penting dalam konsolidasi solidaritas dunia Islam secara global⁷.

Melalui kajian ini, peneliti ingin mengajak pembaca untuk memahami konflik Israel-Palestina secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi aktualitas politiknya, tetapi juga dari sisi historis yang menjadi akar utama dari semua permasalahan. Dengan membedah konflik ini dalam bingkai sejarah dunia Islam modern, diharapkan kita dapat melihat permasalahan ini secara lebih objektif, adil, dan bijak, serta mampu menumbuhkan empati dan kesadaran akan pentingnya perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak.

³ M. Amin Nurdin, “Analisis Akar Konflik Palestina-Israel” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakar, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81972>.

⁴ Beti Dwi Sholehkatina et al., “Analisis Peran Media Sosial Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Teori Orientalisme Edward W Said,” *HUMANIS: Human Resources Management and Business Journal* 1, no. 1 (2024): 31–39.

⁵ Erik Ilham Habibillah, “Pengaruh Kebijakan PBB Dalam Konflik Palestina-Israel,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 1 (2023): 28–46.

⁶ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska, “Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 349–58.

⁷ Susanti and Soraya, “History of Islamic Civilization in the West Asian Region: Tracking the Roots of the Palestine-Israel Conflict.”

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, makalah ini akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya negara Israel dan hilangnya kedaulatan Palestina? (2) Apa saja dinamika utama yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina sejak abad ke-20 hingga sekarang? (3) Bagaimana peran dunia Islam dalam merespons konflik ini? (4) Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. untuk mengkaji latar belakang sejarah terbentuknya negara Israel dan hilangnya kedaulatan Palestina;
2. untuk menjelaskan dinamika utama yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina sejak abad ke-20 hingga sekarang;
3. untuk menganalisis peran dunia Islam dalam merespons konflik ini;
4. untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan historis. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah literatur yang relevan, baik berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring terpercaya⁸. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri akar konflik, menganalisis peristiwa-peristiwa penting, serta menilai perkembangan dan respons dunia terhadap isu ini.

2. PEMBAHASAN

2.1. Latar Belakang Sejarah Palestina

2.1.1. Palestina Sebelum Kedatangan Zionis (Era Kekhalifahan Utsmaniyah)

Sebelum kedatangan gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19, wilayah Palestina merupakan bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman Empire) yang berpusat di Istanbul, Turki. Palestina berada di bawah kendali Utsmaniyah sejak tahun 1516, setelah Sultan Selim I menaklukkan wilayah tersebut dari Mamluk. Dalam sistem administratif Kekhalifahan, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Vilayet (provinsi) Suriah dan memiliki struktur pemerintahan yang stabil⁹.

Selama hampir empat abad di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Palestina mengalami periode relatif damai. Sistem pemerintahan berbasis Islam yang dipegang oleh Kesultanan Utsmaniyah menjamin hak-hak berbagai kelompok etnis dan agama di wilayah tersebut. Kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di bawah prinsip *dhimma*—perlindungan terhadap non-Muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam—dan mereka diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah serta menjalani kehidupan sosial-ekonomi mereka tanpa tekanan besar.

⁸ Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).

⁹ Luqman Al Hakim, "Politik Jihad Turki Utsmani Pada Perang Dunia Pertama," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2021): 58–71.

Dalam periode ini, masyarakat Palestina mayoritas hidup dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Kota-kota seperti Yerusalem, Nablus, Hebron, Gaza, dan Jaffa menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Yerusalem, khususnya, berkembang sebagai pusat spiritual dan administrasi, di mana bangunan-bangunan penting seperti Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock tetap dirawat dan dihormati sebagai warisan dunia Islam¹⁰.

Namun, pada akhir abad ke-19, seiring melemahnya kekuasaan Utsmaniyah, wilayah Palestina mulai menjadi incaran berbagai kepentingan asing. Pemerintah Utsmaniyah sendiri mengalami krisis internal dan tekanan dari kekuatan Eropa yang semakin agresif, seperti Inggris dan Prancis. Dalam kondisi yang rapuh inilah, gerakan Zionisme internasional mulai mengarahkan pandangannya ke Palestina sebagai “tanah yang dijanjikan”¹¹.

2.1.2. Komposisi Etnis dan Agama Masyarakat Palestina

Sebelum kolonisasi Zionis yang masif, masyarakat Palestina terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan agama, namun hidup secara relatif harmonis dalam tatanan sosial yang telah terbentuk selama berabad-abad. Penduduk asli Palestina mayoritas adalah Arab Palestina yang beragama Islam (Sunni), yang hidup di desa-desa dan kota-kota, serta menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan utama.

Selain Muslim, terdapat pula komunitas Kristen Palestina yang telah tinggal di tanah ini sejak masa awal Kekristenan. Mereka tersebar di berbagai kota seperti Bethlehem, Nazaret, dan Yerusalem. Hubungan antara umat Islam dan Kristen di Palestina umumnya berjalan damai, bahkan sering kali terjalin hubungan kekerabatan dan kerja sama ekonomi¹².

Komunitas Yahudi juga telah lama hadir di Palestina, terutama di kota-kota suci seperti Yerusalem, Hebron, dan Safed. Namun, jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan umat Islam dan Kristen. Komunitas Yahudi yang ada sebelum kedatangan Zionisme dikenal sebagai Yahudi lokal atau *Mizrahi*, yang hidup berdampingan dengan komunitas lainnya tanpa mencita-citakan pendirian negara eksklusif¹³.

Dengan kata lain, Palestina sebelum abad ke-20 merupakan masyarakat multikultural dan multiagama yang relatif stabil dan harmonis. Ketegangan antar agama atau etnis sangat jarang terjadi, dan jika pun ada, biasanya bersifat lokal dan cepat diselesaikan oleh otoritas setempat. Keadaan ini berubah drastis dengan datangnya gelombang imigrasi Yahudi Eropa yang membawa ideologi Zionisme,

¹⁰ Farida Hanum Fajrianti et al., “Dinamika Perkembangan Politik Dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani Dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (2024).

¹¹ Ibid.

¹² Syed Ahmad Fathi, “4,000 Tahun: Sejarah Palestin Dari Lewat Zaman Gangsa Hingga Ke Penjajahan Kolonial Moden,” *Nota Sejarah Palestin*, 2024, 1–16.

¹³ Ayla Zhafira, “Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–22.

yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina, tanpa mempertimbangkan eksistensi penduduk asli yang telah lama menetap di sana.

2.1.3. Pentingnya Wilayah Palestina dalam Islam

Palestina, khususnya kota Yerusalem (Al-Quds), memiliki kedudukan yang sangat agung dalam ajaran Islam. Wilayah ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai tanah yang diberkahi (*ardun mubārahah*) dan menjadi tempat berbagai peristiwa penting dalam sejarah kenabian.

Yang paling monumental adalah peristiwa *Isra' dan Mi'raj*, dimana Nabi Muhammad ﷺ melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid al-Aqsha di Yerusalem, lalu naik ke langit ketujuh dalam peristiwa Mi'raj. Masjid al-Aqsha inilah yang kemudian menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Makkah. Oleh karena itu, al-Aqsha memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam Islam.

Selain itu, Palestina juga merupakan tanah para nabi. Di sinilah Nabi Ibrahim *'alaihi al-salām* menetap, Nabi Dawud dan Sulaiman memerintah, dan Nabi Isa *'alaihi al-salām* dilahirkan dan menjalankan dakwahnya. Dalam sejarah kekuasaan Islam, berbagai khalifah dan pemimpin Muslim seperti Umar bin Khattab, Shalahuddin al-Ayyubi, dan Sultan Abdul Hamid II menunjukkan perhatian besar terhadap kemuliaan dan pelestarian wilayah ini¹⁴.

Oleh karena itu, membela Palestina bukan hanya soal solidaritas politik atau kemanusiaan, tetapi juga bagian dari kewajiban iman. Masjid al-Aqsha adalah simbol persatuan umat Islam dan penjagaannya merupakan bentuk kesetiaan terhadap sejarah dan spiritualitas Islam.

2.2. Munculnya Gerakan Zionisme dan Proyek Pendirian Negara Israel

2.2.1. Latar Belakang Lahirnya Gerakan Zionisme

Zionisme adalah gerakan nasionalisme modern yang lahir pada akhir abad ke-19 di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk sebuah negara bangsa bagi orang-orang Yahudi di tanah yang mereka klaim sebagai "Tanah yang Dijanjikan", yaitu Palestina. Lahirnya Zionisme tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik Eropa pada masa itu, khususnya meningkatnya sentimen antisemitisme terhadap komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai negara Eropa Timur dan Tengah, seperti Rusia, Polandia, dan Jerman¹⁵.

Diskriminasi, penganiayaan, dan pembatasan terhadap hak-hak sipil Yahudi di banyak wilayah Eropa membuat sebagian kaum Yahudi mulai berpikir untuk mencari "rumah nasional" mereka sendiri. Pemikiran ini dikembangkan secara sistematis oleh tokoh-tokoh Zionis seperti Moses Hess dan Leo Pinsker, namun tokoh yang paling berpengaruh dalam memformulasikan Zionisme sebagai gerakan politik modern adalah Theodor Herzl. Dalam bukunya yang terkenal, *Der*

¹⁴ Eka Susanti, "Baitul Maqdis Dalam Sejarah Peradaban Islam Hingga Akhir Zaman," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 298–592.

¹⁵ Syahrul Adhim and Yuliati Yuliati, "Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun 1948-1973," *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 61–70.

Judenstaat (Negara Yahudi, 1896), Herzl menyerukan pembentukan negara Yahudi sebagai satu-satunya solusi permanen untuk mengatasi "masalah Yahudi" di Eropa.

Pada Kongres Zionis Pertama yang diadakan di Basel, Swiss pada tahun 1897, para delegasi Yahudi dari berbagai negara menyepakati tujuan utama Zionisme, yaitu "mendirikan sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina" melalui jalur legal dan diplomatik. Sejak saat itu, gerakan Zionisme mulai mengorganisir imigrasi Yahudi secara sistematis ke Palestina, membeli tanah-tanah dari para tuan tanah, dan mendirikan permukiman-permukiman Yahudi¹⁶.

2.2.2. Imigrasi Yahudi dan Perubahan Demografi Palestina

Gelombang pertama imigrasi Yahudi ke Palestina, yang dikenal sebagai *Aliyah Pertama*, berlangsung antara tahun 1882 hingga 1903. Para imigran ini kebanyakan berasal dari Rusia dan Rumania, dan mulai mendirikan koloni-koloni pertanian di wilayah-wilayah yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat Arab Palestina. Gelombang ini disusul oleh *Aliyah* berikutnya, yang meningkat tajam setelah Deklarasi Balfour tahun 1917 dan terutama pasca-Holocaust (Perang Dunia II), ketika komunitas Yahudi Eropa kehilangan jutaan anggotanya¹⁷.

Imigrasi besar-besaran ini secara perlahan mulai mengubah komposisi demografi di Palestina. Tanah-tanah yang dibeli dari tuan tanah Arab—kadang tanpa persetujuan petani yang menempatkannya—menyebabkan penggusuran terhadap penduduk lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial dan resistensi dari masyarakat Palestina yang merasa terancam oleh perubahan struktur sosial dan kepemilikan tanah di negeri mereka.

Zionisme tidak hanya bergerak di bidang migrasi dan ekonomi, tetapi juga aktif di bidang politik. Mereka membentuk institusi-institusi seperti *Jewish Agency* dan *Histadrut* (serikat buruh Yahudi), serta milisi bersenjata seperti Haganah dan Irgun yang kemudian menjadi embrio militer Israel. Aktivitas ini secara bertahap mengarah pada proyek pendirian negara yang lebih terorganisir dan siap secara politik maupun militer.

2.2.3. Deklarasi Balfour dan Peran Inggris dalam Mendukung Zionisme

Peran kekuatan Barat, khususnya Inggris, sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita Zionisme. Pada masa Perang Dunia I, Inggris membutuhkan dukungan Yahudi internasional, terutama dari komunitas Yahudi Amerika, untuk memenangkan perang. Dalam konteks inilah lahir *Deklarasi Balfour* pada 2 November 1917, sebuah surat resmi dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, tokoh Yahudi Inggris, yang menyatakan dukungan pemerintah Inggris atas pendirian "sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina"¹⁸.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Susanti and Soraya, "History of Islamic Civilization in the West Asian Region: Tracking the Roots of the Palestine-Israel Conflict."

¹⁸ Enjum Jumhana, "Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 148–60.

Deklarasi ini memiliki dampak politik yang sangat besar karena memberikan legitimasi internasional terhadap proyek Zionisme, meskipun pada saat itu Inggris juga telah berjanji kepada bangsa Arab (melalui *McMahon-Hussein Correspondence*) untuk mendukung kemerdekaan negara Arab pasca-Perang Dunia I. Janji ganda ini menciptakan konflik serius yang kemudian menjadi sumber dari banyak ketegangan politik di wilayah tersebut.

Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan pembagian wilayah oleh Liga Bangsa-Bangsa, Palestina secara resmi berada di bawah mandat Inggris. Selama masa mandat ini (1920–1948), Inggris memfasilitasi masuknya imigran Yahudi, meskipun terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat Arab Palestina, termasuk Intifada pertama pada 1936–1939. Namun, tekanan internasional dan situasi politik global, terutama pasca-Holocaust, memperkuat tuntutan agar negara Yahudi segera dibentuk¹⁹.

2.2.4. Proklamasi Negara Israel dan Awal Konflik Terbuka

Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Badan Yahudi, secara sepihak memproklamasikan berdirinya Negara Israel di wilayah yang sebelumnya adalah bagian dari Mandat Palestina. Proklamasi ini dilakukan sehari sebelum mandat Inggris secara resmi berakhir. Tindakan ini segera memicu perang besar antara Israel dan negara-negara Arab tetangga, seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak, yang menolak pendirian negara Yahudi di tanah Arab.

Perang Arab-Israel pertama (1948–1949) berakhir dengan kemenangan Israel, dan mengakibatkan lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai *Nakba* (malapetaka), dan menjadi awal dari krisis pengungsi Palestina yang hingga kini belum terselesaikan. Sejak saat itu, konflik Israel-Palestina berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan berbagai dimensi: politik, militer, sosial, dan agama. Pendirian Israel menjadi fakta politik yang didukung oleh banyak negara Barat, namun juga menjadi luka sejarah yang mendalam bagi umat Islam dan bangsa Arab²⁰.

2.3. Konflik Israel-Palestina dari 1948 hingga Kini

2.3.1. Perang Arab-Israel 1948 dan Dampaknya bagi Palestina

Perang Arab-Israel 1948, yang dalam sejarah Palestina disebut sebagai “Nakba” (malapetaka), merupakan tonggak penting awal dari konflik terbuka antara bangsa Palestina dan negara Israel yang baru berdiri. Ketika Israel memproklamkan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, hanya sehari setelah Inggris mengakhiri mandatnya atas Palestina, negara-negara Arab tetangga seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon segera mengumumkan perang terhadap Israel.

Perang tersebut berakhir pada 1949 dengan kemenangan Israel. Akibatnya, Israel berhasil menguasai wilayah yang jauh lebih luas dari yang dialokasikan oleh

¹⁹ Ibid.

²⁰ Anna Zakiah Derajat and Toni Kurniawan, “The Thobe Dress as a New Political Movement and Form of Palestinian Resistance,” *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 16, no. 2 (2023): 163–78.

PBB dalam Rencana Pembagian Palestina (UN Partition Plan 1947). Sekitar 78% dari wilayah Palestina berada di bawah kontrol Israel, sementara Tepi Barat dianeksasi oleh Yordania, dan Jalur Gaza berada di bawah administrasi Mesir.

Yang paling tragis dari peristiwa ini adalah eksodus sekitar 750.000 penduduk Arab Palestina, yang terusir dari rumah dan tanah mereka. Sebagian besar dari mereka menjadi pengungsi di kamp-kamp di Yordania, Lebanon, Suriah, dan wilayah Palestina lainnya. Mereka kehilangan kewarganegaraan, properti, dan akses terhadap tanah air mereka. Hingga kini, krisis pengungsi Palestina masih menjadi isu sentral dalam konflik ini, dengan jutaan keturunan mereka menuntut hak untuk kembali ke tanah asalnya—sebuah tuntutan yang ditolak oleh Israel²¹.

2.3.2. Perang Enam Hari (1967) dan Pendudukan Wilayah Palestina

Perang besar berikutnya terjadi pada Juni 1967, yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Dalam perang ini, Israel melancarkan serangan pre-emptive terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah. Hasilnya sangat mengejutkan dunia Arab: dalam waktu kurang dari seminggu, Israel berhasil merebut:

- Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir,
- Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania,
- dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah.

Dengan demikian, Israel mulai menduduki seluruh wilayah Palestina yang tersisa (Gaza dan Tepi Barat). Pendudukan ini bukan hanya militer, tapi juga berlanjut pada pembangunan permukiman Yahudi secara masif di wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Peremukiman-peremukiman ini hingga hari ini terus meluas, dan merupakan salah satu hambatan utama bagi terwujudnya solusi dua negara.

Pendudukan ini juga menimbulkan penindasan sistemik terhadap warga Palestina, termasuk pembatasan gerak, pembangunan tembok pemisah, penghancuran rumah, dan penangkapan tanpa pengadilan. Resolusi PBB 242 menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya pada 1967, namun hingga kini belum dilaksanakan secara menyeluruh.

2.3.3. Intifada: Perlawanan Rakyat Palestina

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Palestina mulai mengorganisasi bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel. Salah satu bentuk perlawanan paling monumental adalah Intifada (pemberontakan rakyat)²²:

- Intifada Pertama (1987–1993) terjadi sebagai reaksi terhadap perlakuan brutal tentara Israel terhadap rakyat sipil Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Intifada ini ditandai dengan aksi massa seperti pemogokan, demonstrasi, dan lemparan batu oleh anak-anak Palestina, yang direspons dengan kekerasan oleh militer Israel.

²¹ Nurdin, "Analisis Akar Konflik Palestina-Israel."

²² Saskia Aulia Putri and Nur Isdah Idris, "Fenomena Globalize the Intifada Di Tengah Genosida Warga Palestina," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 90–100.

- Intifada Kedua (2000–2005) jauh lebih mematikan, dipicu oleh kunjungan provokatif Ariel Sharon ke Kompleks Masjid al-Aqsha. Intifada ini melibatkan kekerasan bersenjata dan serangan bom bunuh diri oleh kelompok perlawanan Palestina, serta pembalasan militer besar-besaran oleh Israel. Ribuan orang, baik warga Palestina maupun Israel, menjadi korban.

Intifada menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina yang berjuang untuk kemerdekaan, namun juga menunjukkan betapa kompleks dan brutalnya konflik ini ketika masuk ke wilayah kekerasan terbuka.

2.3.4. Proses Perdamaian dan Gagalnya Solusi Dua Negara

Sejak akhir 1980-an hingga awal 2000-an, berbagai upaya perdamaian telah diinisiasi oleh komunitas internasional. Beberapa momen penting dalam proses perdamaian ini meliputi:

- Perjanjian Oslo (1993) antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel, yang menghasilkan pengakuan timbal balik dan berdirinya Otoritas Palestina sebagai badan pemerintahan sementara di sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza. Namun, perjanjian ini gagal mencapai status akhir seperti batas wilayah, status Yerusalem, pengungsi, dan permukiman.
- Konferensi Camp David II (2000) yang dimediasi oleh AS, gagal total karena perbedaan pandangan yang tajam mengenai Yerusalem dan pengungsi.
- Inisiatif Damai Arab (2002) yang menawarkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan syarat Israel mundur dari wilayah 1967 dan mendukung pembentukan negara Palestina. Israel menolak secara terbuka.

Kegagalan demi kegagalan dalam proses perdamaian menyebabkan kekecewaan di pihak Palestina dan memperkuat posisi kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas, yang muncul sebagai kekuatan politik dan militer alternatif dari PLO di Gaza.

2.3.5. Krisis Gaza dan Blokade yang Berkelanjutan

Sejak kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif 2006 dan pengambilalihan kekuasaan di Gaza tahun 2007, Israel bersama Mesir memberlakukan blokade total atas Jalur Gaza. Blokade ini membatasi pergerakan manusia dan barang, menyebabkan krisis kemanusiaan besar di wilayah tersebut.

Israel dan Hamas telah terlibat dalam beberapa perang besar, yakni pada 2008-2009, 2012, 2014, dan 2021. Setiap konflik ini menimbulkan kerusakan besar, terutama di pihak Palestina, dengan ribuan warga sipil tewas dan infrastruktur hancur. Meskipun Gaza adalah wilayah dengan populasi padat dan miskin, Israel tetap menganggapnya sebagai ancaman karena serangan roket dari kelompok perlawanan. Blokade dan operasi militer Israel telah dikritik oleh banyak organisasi internasional sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil.

2.3.6. Situasi Terkini: Eskalasi, Polarisasi, dan Masa Depan yang Tidak Pasti

Konflik Israel-Palestina hingga hari ini tetap menjadi konflik paling menonjol dalam politik dunia. Meskipun banyak negara Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords (seperti UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan), namun perjuangan bangsa Palestina belum mencapai titik terang.

Perpecahan internal antara Fatah (yang menguasai Tepi Barat) dan Hamas (yang menguasai Gaza) turut melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi internasional. Sementara itu, perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat terus berlanjut, membuat impian “solusi dua negara” semakin sulit diwujudkan.

Serangan terbaru yang terjadi sejak akhir 2023 dan berlanjut hingga 2024 menunjukkan eskalasi yang sangat tragis, dengan ribuan korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil yang masif, termasuk rumah sakit dan tempat ibadah. Dunia Islam, termasuk Indonesia, mengecam keras tindakan brutal Israel, sementara dukungan dari negara-negara besar seperti AS terhadap Israel menambah komplikasi dalam penyelesaian konflik.

2.4. Posisi Dunia Islam terhadap Konflik Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel tidak hanya menjadi isu regional, tetapi juga persoalan besar yang menyentuh hati umat Islam di seluruh dunia. Dunia Islam memandang konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan menyangkut nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesucian tempat-tempat suci Islam, khususnya Masjid al-Aqsha di Yerusalem. Sejak awal konflik hingga saat ini, berbagai negara dan organisasi Islam telah menunjukkan respons beragam terhadap situasi yang terjadi.

2.4.1. Respons Politik Negara-Negara Islam

Secara umum, mayoritas negara-negara Islam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dukungan ini terwujud dalam berbagai bentuk:

- Dukungan diplomatik melalui pengakuan terhadap negara Palestina secara resmi, seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, dan negara-negara Arab lainnya.
- Penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, terutama oleh negara-negara yang menganggap Israel sebagai penjajah dan pelanggar hak asasi manusia.
- Partisipasi aktif dalam forum internasional, termasuk PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi-resolusi internasional yang mendukung hak-hak Palestina.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak beberapa tahun terakhir terdapat perubahan signifikan dalam sikap beberapa negara Islam. Melalui Abraham Accords (2020), beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun disambut baik oleh sebagian pihak sebagai

langkah menuju perdamaian, banyak pula yang menilai bahwa langkah ini mengabaikan perjuangan rakyat Palestina.

2.4.2. Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

OKI sebagai wadah negara-negara mayoritas Muslim sejak lama menempatkan isu Palestina sebagai salah satu fokus utama. Berdiri pada tahun 1969 sebagai respons atas pembakaran Masjid al-Aqsha, OKI telah mengadakan berbagai pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan banyak resolusi yang mengecam agresi Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Namun demikian, efektivitas OKI sering dipertanyakan karena:

- Minimnya implementasi nyata dari resolusi yang dihasilkan,
- Kurangnya kekuatan politik dan militer kolektif untuk menekan Israel,
- Adanya perbedaan sikap di antara anggota OKI sendiri.

Meski begitu, OKI tetap menjadi simbol persatuan dan solidaritas dunia Islam terhadap perjuangan Palestina, serta menjadi corong dalam diplomasi internasional untuk membela hak-hak rakyat Palestina.

2.4.3. Gerakan Solidaritas dan Bantuan Kemanusiaan

Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, dukungan terhadap Palestina juga diwujudkan dalam bentuk gerakan masyarakat sipil dan bantuan kemanusiaan. Aksi solidaritas dalam bentuk:

- Penggalangan dana untuk rakyat Palestina,
- Kampanye media sosial melawan agresi Israel,
- Demonstrasi damai mendukung kemerdekaan Palestina,
- Bantuan medis dan logistik ke wilayah konflik,

Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun secara politik dunia Islam sering terpecah, namun di tingkat akar rumput, solidaritas terhadap Palestina tetap kuat dan konsisten.

Badan-badan kemanusiaan seperti MER-C, ACT, Bulan Sabit Merah Turki (Kızılay), Qatar Charity, dan lainnya aktif membantu kebutuhan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza yang diblokade. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam tetap memelihara rasa kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap penderitaan saudara-saudaranya di Palestina.

2.4.4. Dimensi Keagamaan: al-Aqsha sebagai Simbol Persatuan Umat

Salah satu faktor utama yang menjadikan isu Palestina begitu sensitif di dunia Islam adalah kedudukan Masjid al-Aqsha sebagai situs suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. al-Aqsha bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol sejarah, spiritualitas, dan identitas umat Islam. Setiap kali terjadi pelanggaran di kompleks al-Aqsha, reaksi keras datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Demonstrasi, pernyataan kecaman dari ulama, dan seruan jihad secara spiritual kerap disampaikan untuk membela kehormatan situs suci tersebut.

al-Aqsha menjadi pengingat kuat akan pentingnya solidaritas lintas negara dalam membela hak-hak umat Islam yang tertindas, dan menjadi pemersatu umat di tengah berbagai perbedaan mazhab, etnis, dan nasionalisme.

2.4.5. Tantangan Intern dan Masa Depan Sikap Dunia Islam

Meskipun dukungan terhadap Palestina relatif kuat, dunia Islam menghadapi sejumlah tantangan yang melemahkan posisi kolektifnya, antara lain:

- Perpecahan politik di antara negara-negara Muslim, seperti konflik Arab-Iran, krisis Yaman, atau ketegangan antara Turki dan Arab Saudi, yang membuat fokus terhadap isu Palestina menjadi kurang konsisten.
- Ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara-negara Barat, yang kerap menghambat negara-negara Muslim dalam mengambil langkah tegas terhadap Israel.
- Ketidaksamaan strategi dan pendekatan, di mana sebagian negara memilih jalur diplomasi, sementara yang lain mendukung perlawanan bersenjata.

Ke depan, dunia Islam diharapkan dapat menyatukan kembali barisan dan menegaskan posisi kolektif yang lebih kuat, tidak hanya dalam bentuk pernyataan simbolis, tetapi dalam aksi nyata—baik melalui diplomasi internasional, dukungan kemanusiaan, maupun pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum dunia.

2.5. Upaya Penyelesaian Konflik dan Prospek Masa Depan Palestina-Israel

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah memicu berbagai inisiatif perdamaian dari komunitas internasional, negara-negara kawasan, hingga organisasi-organisasi internasional. Upaya penyelesaian ini terus berlangsung meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan serius, termasuk ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan kepentingan, serta perubahan dinamika politik global dan regional.

2.5.1. Upaya Perdamaian Internasional

Beberapa inisiatif perdamaian telah dilakukan sejak konflik pecah secara resmi pada tahun 1948. Upaya-upaya tersebut antara lain:

a. Resolusi PBB

PBB, sebagai organisasi internasional terbesar, telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait konflik ini, seperti:

- Resolusi 181 (1947): Membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, yang ditolak oleh negara-negara Arab.
- Resolusi 242 (1967): Menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki setelah Perang Enam Hari.
- Resolusi 338 (1973): Mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan dan menerapkan resolusi sebelumnya.

Namun, banyak resolusi PBB yang tidak dijalankan secara efektif oleh Israel, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional membuat pelanggaran sering kali tak berujung pada sanksi tegas.

b. Kesepakatan Oslo (1993–1995)

Kesepakatan Oslo merupakan tonggak penting yang mempertemukan Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dalam perjanjian ini:

- Palestina mengakui eksistensi negara Israel.
- Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina.
- Dibentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) untuk mengatur sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza.

Namun, implementasi kesepakatan ini terhambat oleh banyak faktor, termasuk perluasan permukiman Yahudi, ketidakpercayaan antar pihak, dan pergantian kepemimpinan.

c. Peta Jalan Perdamaian (Road Map for Peace, 2003)

Inisiatif ini digagas oleh Kuartet Timur Tengah (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB) untuk mendorong solusi dua negara. Namun, peta jalan ini mengalami stagnasi akibat terus berlanjutnya kekerasan dan ketidakpatuhan terhadap tahapan-tahapan yang disepakati.

2.5.2. Hambatan dan Tantangan Penyelesaian Konflik

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik tetap berlanjut karena sejumlah hambatan serius:

- Ketimpangan kekuatan antara Israel sebagai negara kuat dan Palestina yang masih berjuang mendapatkan kedaulatan penuh.
- Permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang terus bertambah dan menggerus wilayah yang seharusnya menjadi bagian negara Palestina.
- Status Yerusalem, yang diklaim sebagai ibu kota oleh kedua pihak.
- Blokade terhadap Gaza, yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat sipil Palestina dan menyuburkan resistensi.
- Kurangnya kemauan politik dari kekuatan global untuk menekan Israel secara serius.

2.5.3. Peran Negara dan Organisasi Regional

Sejumlah negara seperti **Mesir, Yordania, dan Qatar** memainkan peran mediasi dalam mendorong gencatan senjata atau negosiasi antara Hamas dan Israel, terutama saat terjadi eskalasi di Jalur Gaza. Turki dan Iran mengambil posisi berbeda: Turki lebih aktif secara diplomatik dan simbolik, sementara Iran secara terang-terangan mendukung kelompok-kelompok perlawanan di Palestina. Organisasi regional seperti Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga rutin mengadakan pertemuan dan mengeluarkan kecaman terhadap Israel, meski efektivitasnya sering dipertanyakan.

2.5.4. Solusi Dua Negara vs. Satu Negara

Salah satu perdebatan utama dalam penyelesaian konflik adalah pilihan antara:

- Solusi Dua Negara: Palestina dan Israel hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka dengan batas yang disepakati.
- Solusi Satu Negara: Sebuah negara tunggal dengan hak yang setara bagi semua warga tanpa memandang etnis atau agama.

Solusi dua negara telah lama menjadi arus utama, namun dianggap semakin sulit diwujudkan karena realitas di lapangan (permukiman, blokade, dan fragmentasi wilayah). Sementara itu, solusi satu negara ditolak keras oleh Israel karena dianggap akan mengancam identitas Yahudi negara tersebut.

2.5.5. Prospek Masa Depan

Masa depan konflik Palestina-Israel sangat bergantung pada banyak faktor:

- Dinamika politik internal kedua belah pihak. Misalnya, persatuan faksi-faksi Palestina (Hamas dan Fatah) dan stabilitas politik Israel.
- Perubahan kebijakan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Eropa, terhadap Israel dan Palestina.
- Tekanan masyarakat global, termasuk gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) yang terus berkembang untuk menekan Israel secara ekonomi.
- Peran dunia Islam, apakah akan mampu bersatu secara politik dan strategis dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.

Meskipun jalan menuju perdamaian tampak panjang dan penuh rintangan, harapan akan hadirnya solusi yang adil tetap hidup. Selama perjuangan rakyat Palestina terus mendapat dukungan internasional dan kesadaran global tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan terus meningkat, maka prospek untuk masa depan yang lebih baik tetap terbuka.

3. KESIMPULAN

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu persoalan paling kompleks dan berlarut dalam sejarah dunia modern, terutama dalam konteks sejarah dunia Islam. Akar permasalahannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika kolonialisme, munculnya gerakan Zionisme, serta kebijakan negara-negara Barat setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Wilayah Palestina, yang sejak lama dihuni oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi secara berdampingan, mulai mengalami perubahan drastis akibat proyek pendirian negara Israel yang didukung kekuatan kolonial. Deklarasi berdirinya Israel pada tahun 1948 menjadi titik balik sejarah yang menandai dimulainya konflik terbuka dan pengusiran besar-besaran warga Palestina dari tanah air mereka, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba. Sejak saat itu, rangkaian perang, pendudukan, dan kekerasan terus berlangsung, mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Palestina dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Konflik ini bukan hanya tentang sengketa wilayah, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, keadilan historis, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dunia Islam secara umum memandang konflik ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius untuk mendukung rakyat Palestina, meskipun respons dan langkah konkret antar negara Islam tidak selalu sejalan. Sementara itu, upaya perdamaian terus dilakukan,

namun kerap menemui jalan buntu karena perbedaan kepentingan, ketimpangan kekuatan, dan realitas politik yang rumit.

Memahami konflik Israel-Palestina secara menyeluruh membutuhkan pendekatan historis, politik, dan kemanusiaan. Isu ini tidak bisa dilihat secara hitam-putih, tetapi harus didekati dengan kejujuran intelektual dan kepedulian terhadap nilai-nilai keadilan. Bagi umat Islam dan masyarakat dunia secara umum, penting untuk terus mengedepankan prinsip solidaritas, perdamaian, dan hak asasi manusia dalam mendukung penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Di tengah ketidakpastian masa depan, harapan akan perdamaian tetap ada, selama ada komitmen dari komunitas internasional, dunia Islam, dan rakyat Palestina sendiri untuk terus memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara yang bijak, terorganisir, dan bermartabat.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang akar historis, dinamika politik, dan dimensi kemanusiaan dari konflik Israel-Palestina, khususnya dalam konteks dunia Islam. Penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas untuk melihat konflik ini tidak sekadar sebagai pertikaian regional, tetapi sebagai masalah global yang sarat akan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab kolektif. Pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sejarah dan geopolitik konflik ini diharapkan mampu mendorong sikap yang lebih bijak dan adil dalam merumuskan respons kebijakan dan sikap solidaritas, terutama dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menggambarkan secara empiris respons aktual dunia Islam atau masyarakat internasional dalam angka atau data lapangan terkini. Kedua, keterbatasan akses terhadap sumber primer dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik juga membatasi kedalaman analisis pada aspek politis dan diplomatik kontemporer. Ketiga, karena fokusnya yang luas, penelitian ini belum mampu mengelaborasi secara mendalam peran negara-negara Islam tertentu maupun aktor non-negara dalam proses perdamaian.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian ini dengan pendekatan interdisipliner, termasuk pendekatan politik internasional, hubungan antaragama, dan analisis media. Selain itu, penelitian empiris berbasis lapangan mengenai persepsi masyarakat Muslim terhadap konflik ini, maupun evaluasi terhadap kebijakan negara-negara Islam dalam merespons krisis Palestina, juga perlu dikembangkan. Kajian yang lebih spesifik terhadap aktor-aktor kunci dalam proses perdamaian seperti PBB, OIC, atau negara-negara regional juga penting untuk mendalami dinamika diplomatik yang sedang berlangsung. Akhirnya, sangat diperlukan adanya kerja sama antara akademisi, aktivis, dan lembaga internasional

untuk terus mengadvokasi penyelesaian damai yang berkeadilan bagi rakyat Palestina secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Syahrul, and Yuliati Yuliati. "Konflik Terbentuknya Negara Israel Pada Tahun 1948-1973." *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 61-70.
- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Iगत Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Andien, Hersa Syulizar, Ananda Delia, Farida Anisa Khotimah, Restu Arissaputra, and Muhamad Parhan. "Peran Muslim Dalam Konflik Geopolitik: Analisis Perang Israel-Palestina." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024): 152-68.
- Christie, Rachel, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska. "Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 349-58.
- Derajat, Anna Zakiah, and Toni Kurniawan. "The Thobe Dress as a New Political Movement and Form of Palestinian Resistance." *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 16, no. 2 (2023): 163-78.
- Fajrianti, Farida Hanum, Intan Delima Hasibuan, Fara Salsabila Munthe, Sri Kusuma Wardani, and Muhammad Ilham. "Dinamika Perkembangan Politik Dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani Dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (2024).
- Fathi, Syed Ahmad. "4,000 Tahun: Sejarah Palestin Dari Lewat Zaman Gangsa Hingga Ke Penjajahan Kolonial Moden." *Nota Sejarah Palestin*, 2024, 1-16.
- Habibillah, Erik Ilham. "Pengaruh Kebijakan PBB Dalam Konflik Palestina-Israel." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 1 (2023): 28-46.
- Hakim, Luqman Al. "Politik Jihad Turki Utsmani Pada Perang Dunia Pertama." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2021): 58-71.
- Jumhana, Enjum. "Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 148-60.
- Nuridin, M. Amin. "Analisis Akar Konflik Palestina-Israel." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81972>.
- Putri, Saskia Aulia, and Nur Isdah Idris. "Fenomena Globalize the Intifada Di Tengah Genosida Warga Palestina." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 90-100.
- Sholehkatin, Beti Dwi, Lutfia Adita Putri Winarta, Putri Wijayanti, and Rezki Citra Rahayu. "Analisis Peran Media Sosial Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau

- Dari Teori Orientalisme Edward W Said.” *HUMANIS: Human Resources Management and Business Journal* 1, no. 1 (2024): 31–39.
- Susanti, Eka. “Baitul Maqdis Dalam Sejarah Peradaban Islam Hingga Akhir Zaman.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 298–592.
- Susanti, Nelvi, and Lusi Soraya. “History of Islamic Civilization in the West Asian Region: Tracking the Roots of the Palestine-Israel Conflict.” *Journal of Islamic History* 4, no. 1 (2024): 43–61.
- Zhafira, Ayla. “Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–22.